



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Juli 2013

Halaman: 4

Sekolah Tak Bisa Seenaknya Tarik SPP

JOGJA - Pemkot Jogja tahun ini mengeluarkan kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa yang duduk di jenjang SMA dan SMK negeri. Dengan kebijakan tersebut, sekolah tidak bisa seenaknya menarik SPP.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan, BOP yang diberikan Rp 900 ribu per siswa per tahun bagi SMA sedangkan siswa SMK memperoleh BOP Rp 1,2 juta per tahun. Total anggaran BOP yang sudah diputuskan dalam Perwal 20/2013 serta SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja 188/008 berjumlah Rp 18.729.900.000.

"Anggaran tersebut sangat mungkin ku-

rang, sehingga peruntukannya baru sebatas siswa SMA/SMK negeri," jelas Edy di Kantor Disdik Jogja, Senin (8/7).

Adanya BOP tersebut berdampak pada kebijakan sekolah menarik biaya SPP. Ketetapan yang dikeluarkan disdik, SMA kini hanya boleh menarik SPP maksimal Rp 170 ribu per bulan. Sedangkan bagi SMK, ada dua kategori. Untuk SMKN 1 dan 7 SPP sebesar Rp 90 ribu per bulan. Sedangkan SMKN 2 sampai 6 maksimal SPP-nya Rp 100 ribu per bulan.

Edy menjelaskan, BOP tersebut meng-cover 17.546 siswa SMA/SMK di Kota Jogja. Sedangkan peruntukannya, digunakan untuk pembelian alat tulis, kertas, materi,

perangko, pembayaran rekening listrik, air, telpon, dan pemeliharaan gedung sekolah.

"Pendaanaan BOP di luar biaya investasi sekolah. Untuk biaya investasi, penentuannya kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah," terang Edy.

Meski diserahkan sepenuhnya pada sekolah, bukan berarti sekolah negeri bisa seenaknya menentukan besaran dana investasi sekolah. Dinas akan mencermati rancangan anggaran pembiayaan dan belanja sekolah (APBS) masing-masing sekolah.

"Jika di luar kewajaran, maka kami tidak akan menandatangani RAPBS-nya," kata Edy.

Edy berharap BOP tersebut dapat meringankan biaya pendidikan masyarakat seiring dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah ditetapkan pemkot. Penggunaan BOP, akan dikontrol melalui APBS sekolah.

Sementara itu Sekretaris Disdik Jogja, Budi Asrori mengatakan biaya investasi sekolah memberikan kesempatan bagi sekolah untuk melakukan pengembangan. Sehingga, disdik tidak akan melakukan pengembangan.

"Mekanisme pungutannya sudah jelas, berdasarkan kesepakatan sejumlah pihak," terangnya.

Sedangkan pendistribusian BOP, akan dilakukan beberapa tahun. "Penyaluran pertama sudah dilakukan pada Maret-April ini. Ini dibiayai dari APBD," kata Budi. (bhn/iwa/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005